

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, E., & Rati, D. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media .
- Ariwibowo, I., & Setiawan, B. (2019). *Penagihan Pajak*. Jakarta: Edu Pustaka.
- Cahyady, Y. (2021). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 165-177.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). *Kajian Fiskal Regional Kaltim Triwulan II 2022*. Samarinda: Kanwil DJPb Kalimantan Timur.
- Gubernur DKI Jakarta. (2017). *Pergub DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Daerah.
- Gubernur Kalimantan Timur. (2019). *Pergub Kaltim No. 10 Tahun 2011, Perubahan terakhir No. 47 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan* . Samarinda: Sekretariat Daerah.
- Gubernur Kalimantan Timur. (2020). *Peraturan Gubernur Kaltim No. 7 Tahun 2011, Perubahan terakhir No. 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor*. Samarinda: Sekretariat Daerah.
- Gubernur Kalimantan Timur. (2020). *Pergub Kaltim No. 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* . Samarinda: Sekretariat Daerah.
- Gubernur Kalimantan Timur. (2020). *Pergub Kaltim No. 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor*. Samarinda: Sekretariat Daerah.
- Hadi, H. K. (2018). Tinjauan Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. *Karya Tulis Tugas Akhir*.
- Harris, F., & Sulfan, S. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 310-326.

- Hutapea, A. M., Mahardhika, A. F., Royan, A., & Irawan, F. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Surat Teguran Di Kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 100-106.
- Jaya, I. S., & Supriyadi, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 114-123.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). *Kamus KBBI Versi Daring*. Diambil kembali dari KBBI: <https://kbbi.web.id/implementasi>
- Kristiono, N. (2015). *Buku Ajar Otonomi Daerah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kurniawan, Panca, & Pamungkas, B. (2006). *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Lewis, Saunders, M., & Thornhill, A. (2019). *Research Method for Business Students*. New York: Pearson.
- Liyana, N. F., Fitriandi, P., & Riyanto, E. (2019). *Praktikum Penagihan Pajak & Sengketa Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan RI. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Kalimantan Timur. (2011). *Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kalimantan Timur. (2014). *Perda Kaltim No. 08 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kalimantan Timur. (2019). *Perda Kaltim No. 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah RI. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah RI. (1998). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2000). *C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2000). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara .
- Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2022). *B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rifqiansyah, H., Saifi, M., & Azizah, D. (2014). Analisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Samosir, H. H. (2021). *Penagihan Pajak Daerah*. Depok: Diandra Primamitra Media.
- Siregar, L. F. (2017). *Tinjauan Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Seratus Penunggak Pajak Terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua*. Tangerang Selatan: PKN STAN.
- Situs Resmi Provinsi Kalimantan Timur. (2022, Juni 3). *Sukses karena PAD Meningkat*. Diambil kembali dari Berita Kaltim:

[https://www.kaltimprov.go.id/berita/sukses-karena-pad-meningkat#:~:text=Kepala%20Badan%20Pendapatan%20Daerah%20\(Bapenda,realisasi%20Rp%205%2C9%20triliun.](https://www.kaltimprov.go.id/berita/sukses-karena-pad-meningkat#:~:text=Kepala%20Badan%20Pendapatan%20Daerah%20(Bapenda,realisasi%20Rp%205%2C9%20triliun.)

- Suhartono, R., & Ilyas, W. (2017). *Praktikum Perpajakan*. Jakarta: Penerbit in Media.
- Wardana, D., & Nazir, Y. (2018). Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat dalam Pengelolaan Kekayaan Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Kajian Pemerintahan*.
- Wijaya, S., & Pardede, U. Z. (2020). Penerapan Daluwarsa Penetapan dalam Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, VII(2).
- Wijianti, T., & Fitriandi, P. (2022). Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Banjarbaru Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 275-283.
- Zuraida, I. (2010). *Penagihan dan Sengketa Pajak*. Tangerang Selatan: PKN STAN.